

PENGELOLAAN RSUD DI KULONPROGO MASIH BURUK Istana MIP: Perbaiki Pelayanan

PENGASIH (KR)-Pelayanan kesehatan dan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Kulonprogo dinilai masih buruk. Legislatif minta pelayanan diperbaiki, sebab kalau tidak, komplain akan terus menerus terjadi, serta persaingan global tidak pernah terbendung, termasuk persaingan usaha rumah sakit.



KR-Widiastuti
Istana SH MIP

Hal itu dikatakan Istana SH MIP Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Kulonprogo. "Pengelolaan RSUD dan pelayanan kesehatan harus terus diperbaiki. Tidak boleh mengandalkan DPRD atau Komisi IV, tetapi juga peran masyarakat, terutama keterpanggilan pengelola, pelaku, pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, serta pelayanan kesehatan secara umum," ujar Istana, Jumat (18/11).

Menurut Istana, perbaikan ini penting, sebab bila tidak, komplain itu akan terus menerus terjadi. Kalau pelayanan tidak diperbaiki, RSUD akan kalah bersaing dengan rumah sakit lain. "Hal itu sebenarnya sudah terbukti. Masyarakat Kulonprogo lebih cenderung lari ke

rumah sakit swasta, rumah sakit di luar Kulonprogo. Mereka merasa karena fasilitas RSUD, Puskesmas belum memenuhi harapan mereka," kata Istana yang merupakan Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Samigaluh Kalibawang Giri-mulyo (Dapil Sakagiri).

"Soal ketersediaan ambulans desa, sampai hari ini tidak pernah dibahas. Kemudian bagaimana peningkatan puskesmas wilayah Utara. Karena keduanya, RSUD itu berada di Selatan. Untuk masyarakat bagian Utara, bagaimana peningkatan pelayanan puskesmasnya, sebelum ada RSUD. Ini merupakan hak dasar rakyat. Kalau tidak ada perbaikan yang terjadi seperti saat ini, masyarakat Utara cenderung berobat ke Muntilan, Magelang, yang tengah ke Sleman," tandasnya. (Wid)

'Sektor Jasa'. Itu harus bagaimana? Penting terkait kecepatan pelayanan, ketepatan, keramahan, sikap kepedulian. Juga tanggapdaruratan, terutama menerapkan hak-hak kesehatan masyarakat secara normatif," ucap Istana.

Pansus nantinya, tambah Istana, akan bicara serius sampai ke solusi, termasuk kalau kurang fasilitas, sarpras, ataupun SDM. Sehingga tuntas. Pihaknya juga akan konsultasi ke Kementerian Kesehatan, fasilitas apa yang bisa diraih dari pusat, untuk mendukung sistem tata kelola dan pelayanan kesehatan di Kulonprogo.

"Soal ketersediaan ambulans desa, sampai hari ini tidak pernah dibahas. Kemudian bagaimana peningkatan puskesmas wilayah Utara. Karena keduanya, RSUD itu berada di Selatan. Untuk masyarakat bagian Utara, bagaimana peningkatan pelayanan puskesmasnya, sebelum ada RSUD. Ini merupakan hak dasar rakyat. Kalau tidak ada perbaikan yang terjadi seperti saat ini, masyarakat Utara cenderung berobat ke Muntilan, Magelang, yang tengah ke Sleman," tandasnya. (Wid)

KAPOLDA DIY IRJEN POL SUWONDO NAINGGOLAN MINTA

Senkom Mitra Polri Aktif Bantu Jaga Kamtibmas

PENGASIH (KR) - Senkom Mitra Polri Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diminta terus berperan aktif membantu Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Salah satunya melalui Jaga Warga, mengendalikan sekaligus membantu menghentikan kejahatan jalanan dan tawuran.

"Dalam pertemuan, bapak Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan minta pengurus dan anggota Senkom Mitra Polri DIY juga membantu mengatasi masalah-masalah di lingkungan masyarakat (*problem solving*)," kata Humas Biro Publikasi Humas dan Antar Lembaga (PHMAL) Senkom Mitra Polri DIY, Sulistiyono di Sekretariat Senkom Mitra Polri Kulonprogo, Kalurahan Margosari Kapanewon Pengasih, Jumat (18/11).

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Senkom Mitra Polri DIY, H Budi Hartono SKom bersama pengurus harian dan Ketua Senkom Mitra Polri Kota/Kabupaten se-DIY. Lebih lanjut Sulistiyono

mengungkapkan, dalam arahnya Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan, SIK, MH juga mengingatkan Senkom Mitra Polri DIY harus siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan membangun sinergitas bersama kepolisian dan *stakeholder* lainnya. Sementara itu Ketua Senkom Mitra Polri DIY, H Budi Hartono SKom menyatakan selalu siap jika dilibatkan dalam kegiatan yang diadakan Polda IY. Apalagi saat ini Polda DIY dan Senkom Mitra Polri DIY telah menandatangani Pedoman Kerja antara Senkom Mitra Polri DIY dengan Polda DIY tentang Peran Serta Senkom Mitra



KR-Asrul Sani

Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan dan Ketua Senkom Mitra Polri DIY Budi Hartono SKom salam komando.

Polri Dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Selanjutnya pedoman kerja tersebut akan segera diimplementasikan di jajaran senkom tingkat kabupaten/kota. "Pedoman kerja tersebut menjadi acuan bersama antara senkom kabupaten/kota dengan Polres dan Polresta untuk terus bersinergi menjaga Kamtibmas," ungkap Budi.

Senkom Mitra Polri merupakan kelompok masyarakat yang ingin berperan dalam membantu mengin-

formasikan dan membantu pengamanan lingkungan di sekitarnya atau di mana saja berada serta memberikan informasi tentang pentingnya pengamanan swakarsa di lingkungan masing-masing sebagai wujud Bela Negara dengan semangat patriotisme dan nasionalisme dalam wadah NKRI. Senkom Mitra Polri dibentuk sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU no 2/2002 tentang Pamswakarsa. (Rul)

PENELITI UNIVERSITAS TELKOM SOSIALISASIKAN 'SIHUCA' Mudahkan UMKM Kelola SDM

SAMIGALUH (KR) - Pandemi Covid-19 telah memaksa para pengusaha kecil untuk memasarkan produk mereka melalui *online*. Tapi dengan segala keterbatasan maka upaya pemanfaatan digitalisasi belum bisa berjalan baik. Sehingga penjualan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terdapat bahkan terhenti, akibatnya banyak UMKM gulung tikar.



KR-Asrul Sani

Dr Dian Indiyati MSi (kiri), Dr Nidya Dudija dan M Yudha Febrianta MM menyampaikan hasil penelitian pada pelaku UMKM.

"Keterbatasan SDM pelaku UMKM dalam memanfaatkan digitalisasi menjadi faktor utama tidak berjalannya pemasaran produk, sehingga banyak UMKM tidak bisa bertahan. Dalam upaya mendampingi dan membantu para pelaku UMKM agar bangkit dan maju, kami merancang Aplikasi SiHuCa (Digitalisasi kompetensi Human Capital)," kata Ketua Tim Peneliti dari Universitas Telkom Bandung, Dr Dian Indiyati MSi saat sosialisasi SiHuCa bagi pelaku UMKM di Desa Wisata Tinalah Kalurahan Purwoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kamis (17/11).

Diungkapkan, kegiatan tersebut merupakan salah satu keluaran Program Riset Keilmuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berjudul Membangun Kompetensi Human Capital Ma-

nagement (HCM) Berbasis Digitalisasi untuk Meningkatkan Kinerja UMKM Berdaya Saing Global. Selain Dian Indiyati tampil juga pembicara anggota tim yakni Dr Nidya Dudija MPsi dan M Yudha Febrianta ST, MM.

Dian Indiyati menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pelaku UMKM pada Destinasi Super Prioritas (DSP) Borobudur di bidang *food and beverage, fashion, craft* dan *services* terkait *human resources planning/HRP*, ketenagakerjaan, etika bisnis, remunerasi, kinerja dan daya saing. "Hasil penelitian menunjukkan HRP, ketenagakerjaan, etika bisnis dan remunerasi yang semakin baik akan diperoleh kinerja UMKM juga semakin baik. HRP menghasilkan nilai yang paling rendah sehingga perlu ditingkatkan agar daya saing UMKM lebih tinggi," ujarnya. (Rul)

Anggota Tim Dr Nidya Dudija menambahkan, latar belakang tim merancang Aplikasi SiHuCa, setelah pihaknya melihat hasil riset tersebut. Tujuannya untuk memudahkan UMKM mengelola SDM terutama terkait identifikasi kebutuhan SDM di masa mendatang. Sehingga UMKM dapat meningkatkan daya saingnya melalui pengelolaan SDM yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan produk yang kompetitif dan profit.

"SiHuCa berisi tahapan pengelolaan SDM mulai dari proses perencanaan SDM, rekrutmen seleksi, *training development* yang dibutuhkan, penilaian kinerja hingga sistem remunerasi bagi UMKM. Aplikasi ini nanti dapat digunakan UMKM di seluruh Indonesia dengan beragam bidang usaha. Agar lebih optimal maka SiHuCa akan dilakukan pengembangan secara berkelanjutan," tuturnya. (Rul)

SEORANG SANTRI AL MUKMIN SUKOHARJO

Korban Terseret Ombak Pantai Seruni

WONOSARI (KR) - Korban hilang terseret ombak Pantai Seruni Kapanewon Tepus, Gunungkidul Muh Yuszky Fahimudin (18) santri dari Pondok Pesantren Al Mukmin Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah warga Buduran, Sidoharjo Jawa Timur ditemukan dalam keadaan meninggal Jumat (18/11). Jenazah korban ditemukan beberapa ratus meter dari lokasi kejadian terseret ombak Pantai Seruni. Korban tersebut dalam pencarian selama lebih 24 jam setelah terseret ombak saat bermain air bersama teman-temannya di pantai tersebut. "Jenazah korban ditemukan sekitar pukul 10.00 dalam keadaan terampung di laut," kata Sekretaris SAR Satlinmas Wilayah II DIY Surisdiyanto di lokasi kejadian Jumat (18/11).

Setelah kejadian Tim SAR melakukan pencarian dengan penyisiran me-



KR-Dok SAR Satlinmas Korwin II DIY

Proses evakuasi jenazah setelah ditemukan meninggal di Pantai Seruni.

lalui darat maupun laut dengan melibatkan Sasarnas, Pol Airud, Ban Ops Satlinmas DIYSatpol PP DIY, Pemkal Tepus, SAR Code-X, Polsek Tepus, TNI

AL, SAR DIY Dis Bantul, RAPI, Nelayan dan warga. Namun hingga lebih dari 18 jam keberadaan korban belum ditemukan. Selang enam jam kemudian Tim

SAR kembali melakukan penyisiran di laut dengan menambah jangkauan pencarian dan akhirnya keberadaan korban ditemukan dalam keadaan terampung berda beberapa ratus meter dari titik lokasi kejadian. Selanjutnya mayat langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Wonosari untuk dimintakan Visum Dokter.

"Usai dilakukan pemeriksaan jenazah korban diambil pihak keluarganya untuk dimakamkan," ujarnya.

Sebelum korban terseret ombak mereka datang bersama rombongan santri Ponpes Al Mukmin Sukoharjo, Jawa Tengah yang jumlahnya lebih kurang 100 orang menuju Pantai Seruni, Tepus, Gunungkidul untuk berkemah sejak Rabu (16/11) sekitar pukul 17.00 WIB. Pagi harinya sekitar pukul 5.00 Wib korban bersama teman-temannya bermain air. (Bmp)

Gebyar Budaya Hingga Luncurkan HCU

WONOSARI (KR) - Memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58, Bupati Gunungkidul meluncurkan High Care Unit (HCU) RSUD Wonosari di auditorium Taman Budaya Gunungkidul (TBG).

Kegiatan yang diikuti seluruh insan kesehatan juga ditampilkan gebyar budaya, paduan suara medika hingga dagelan mataraman Dalidjo CS. "Memperingati HKN terus kobarkan semangat pengabdian. Tetap kompak dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes)

Gunungkidul dr Dewi Irawati dalam sambutannya, Rabu (16/11).

Kegiatan dihadiri Bupati Gunungkidul H Sunaryanta, Ketua DPRD Endah Subekti Kuntariningsih SE, Forkopimda, Kepala Dinas terkait dan para insan kesehatan. Rangkaian HKN digelar lomba kalurahan sehat, profil dan inovasi puskesmas, video edukasi, jalan seha, voly, tarik tambang, baksos pemberian makanan tambahan balita, donor darah, anjagsana pegawai dan pensiunan pegawai kesehatan, anjagsan lansia hidup sendiri, jamboree kader



KR-Dedy EW

Bupati H Sunaryanta meluncurkan HCU.

dan talkshow.

Diungkapkan, situasi sekarang yang masih pandemi insan kesehatan harus tetap siaga, tidak

pernah kendor. Bahkan 2 rumah sakit yakni RSUD Wonosari dan RS Pelita Husada Lulus Paripurna Bintang lima. (Ded)

MASIH ADA ASN ZAKAT RP 4 RIBU SEBULAN

Akhir Oktober Pendapatan Baznas Rp 2,4 Miliar

WONOSARI (KR) - Meskipun belum mencapai target Rp 3,6 miliar pada tahun 2022, tetapi sampai bulan Oktober pendapatan Baznas Gunungkidul sudah mencapai Rp 2.414.501.153,- Jumlah ini sudah melampaui pendapatan tahun-tahun sebelumnya Rp 1,9 milyar. Hal ini dikarenakan ada peningkatan kesadaran aparat sipil negara (ASN) disejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Ada 13 OPD realisasinya lebih dari 100 persen. Seperti Sekretariat Daerah (Setda) targetnya hanya Rp 46 juta, tetapi realisasinya Rp 66.814.000,- (145 persen) atau pegawainya berzakat Rp 145 ribu tiap bulan.

"Tetapi juga ada OPD yang baru mencapai target 4 persen atau rata-rata ASN berzakat Rp 4 ribu sebulan," kata Ketua BAZNAS Gunungkidul H Mustangid MPd, Rabu (16/11)

Adapun 13 OPD yang melampaui target, Setda 145 persen, Dinas Perhubungan 128 persen, Badan Kesatuan Bangsa 125 persen, Kapanewon Karangmojo 121 persen, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja 120 persen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 120 persen, Kapanewon Purwosari 115 persen, Kapanewon Gedangsari 113 persen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 112 persen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 111 persen, Dinas Kominfo 107 persen, Kapewon Rongkop 105 persen, Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayaan) 101 persen. Sebagian besar OPD, hampir 30 OPD targetnya di atas 50 persen, bahkan belasan yang sudah mencapai 80-90 persen. (Ewi)

BWI Agar Mampu Selesaikan Problem Wakaf

PENGASIH (KR)-Problem wakaf di Kulonprogo sangat kompleks. Terutama penyelesaian sertifikat tanah wakaf dan adanya penggunaan harta wakaf yang tidak sesuai ikrar. Oleh karena itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

Kepala Kankemenag Kulon Progo, H.M. Wahib Jamil SAG MPd. menyampaikan hal itu saat pembukaan Raker BWI, di Aula Riptaloka kantor setempat, Rabu (15/11).

Hadir sebagai narasumber, Devisi Pengelolaan dan



KR-Widiastuti

Raker Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pemberdayaan Wakaf BWI Perwakilan DIY, Drs H Ahkmad Subkhi MPd.

"Secara umum tanah wakaf di Kulonprogo juga belum produktif. Untuk itu menjadi tugas BWI untuk

menjadikannya sebagai wakaf produktif. Tentu bisa menjalin kerjasama dengan Baznas dan Lembaga Wakaf Uang. Maka diharapkan agar program kerja BWI Perwakilan

Kulonprogo mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tentang Wakaf tersebut," pungkas Jamil.

Devisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf BWI Perwakilan DIY, Ahkmad Subkhi menyampaikan tentang Program Kerja BWI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. "Salah satu program unggulan BWI DIY tentang adanya Pojok Wakaf Uang Digital. Program ini diharapkan dapat bermanfaat untuk umat, terutama memanfaatkan Wakaf tanah sehingga menjadi produktif," tuturnya. (Wid)